

**PERANAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
HUKUM MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA POLISI SEKTOR  
(POLSEK) TRIENGGADENG**

**Junaidi<sup>(1)</sup>, Suhaibah<sup>(2)</sup>, Marzuki<sup>(3)</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

junaidi@gmail.com<sup>1</sup>, suhaibah@unigha.ac.id<sup>2</sup>, marzuki@unigha.ac.id<sup>3</sup>

\*Corresponding author email: suhaibah@unigha.ac.id

**Abstrak**

Kesadaran hukum masyarakat sangat penting bagi terciptanya masyarakat yang taat hukum, aman, teratur, dan berkeadilan. Masyarakat Kecamatan Triengadeng belum sepenuhnya sadar hukum. Sebagai garda terdepan kepolisian, Bhabinkamtibmas memiliki tugas penting untuk membuat masyarakat paham akan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kerja Polsek Triengadeng. Hambatan Bhabinkamtibmas dan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Upaya Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologi. Peranan Bhabinkamtibmas di wilayah kerja Polsek Triengadeng dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dilakukan dengan upaya memberikan edukasi dan sosialisasi tentang hukum, melakukan penyuluhan tentang hukum dan mengadakan pertemuan dengan kelompok masyarakat untuk membahas masalah keamanan dan ketertiban. Hambatan Bhabinkamtibmas dan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat antara lain minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, Keterbatasan waktu dan sumber daya, Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian dan Faktor budaya dan lingkungan. Upaya Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat antara lain Memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat, Mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, Memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan Menjalin hubungan yang baik dengan lembaga penegak hukum lainnya.

**Kata Kunci:** Peranan, Bhabinkantibmas, Kesadaran Hukum Masyarakat

**Abstract**

*Community legal awareness is very important for the creation of a law-abiding, safe, orderly and just society. The people of Triengadeng District are not fully aware of the law. As the vanguard of the police, Bhabinkamtibmas has an important task to make people understand the law. The purpose of this study was to determine the Role of Bhabinkamtibmas in Increasing Public Legal Awareness in the Working Area of the Triengadeng Police. Obstacles to Bhabinkamtibmas and Village Officials in Raising Community Legal Awareness. Bhabinkamtibmas Efforts to Increase Public Legal Awareness. The research method used in this research is normative juridical and sociological juridical research. The role of Bhabinkamtibmas in the working area of the Triengadeng Police in increasing public legal awareness is carried out by providing education and outreach about law, conducting counseling about law and holding meetings with community groups to discuss issues of security and order. Obstacles to Bhabinkamtibmas and Village Officials in Raising Community Legal Awareness include the lack of public understanding of the law, lack of support from local government, limited time and resources, public distrust of police officers and cultural and environmental factors. Bhabinkamtibmas' efforts in increasing public legal awareness include providing legal outreach to the community, holding meetings with community leaders, providing oversight of law enforcement and maintaining good relations with other law enforcement agencies.*

**Keywords:** Role, Bhabinkantibmas, Community Legal Awareness

**Pendahuluan**

Indonesia merupakan Negara Hukum. Negara Hukum adalah Negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh ketentuan hukum.<sup>1</sup> Dalam sistem hukum Indonesia, hukum dijadikan sebagai supremasi atau kekuasaan tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan bermasyarakat,

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.18

berbangsa, maupun bernegara. Sebagai negara hukum, Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan yang bertugas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua warga negara.

Kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.<sup>2</sup> Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai pemahaman seseorang tentang hak dan kewajiban hukumnya sebagai warga negara serta konsekuensi dari perbuatannya jika melanggar hukum. Kesadaran hukum masyarakat sangat penting bagi terciptanya masyarakat yang taat hukum, aman, teratur, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga yang berwenang harus terus berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi hukum yang efektif. Ujung tombak pelaksanaan polmas adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang merupakan *community officer* (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan.<sup>3</sup>

Bhabinkamtibmas adalah polisi yang ditempatkan di desa atau kelurahan untuk melakukan tugas-tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah desa atau kelurahan, mengidentifikasi potensi konflik dan mengambil tindakan pencegahan, serta membantu memperkuat kerjasama antara masyarakat dan polisi. Kecamatan Trienggadeng adalah sebuah kecamatan yang masuk dalam wilayah kabupaten Pidie Jaya. Kecamatan Trienggadeng memiliki 27 gampong (desa). Masyarakat Kecamatan Trienggadeng belum sepenuhnya sadar hukum. Dimana masih ditemukan kasus pelanggaran hukum di wilayah kerja Polsek Trienggadeng. Peran yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kecamatan Trienggadeng untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Trienggadeng belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Trienggadeng belum dapat di atasi dengan adanya bhabinkamtibmas yang selalu berperan aktif di wilayah kerja Polsek Trienggadeng. Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam Skripsi dengan judul "Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kerja Polisi Sektor (Polsek) Trienggadeng".

### **Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologi. Yuridis normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.<sup>4</sup> Serta peraturan yang mengatur tentang peran Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yuridis sosiologis artinya penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kegiatan preventif dan represif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani.<sup>5</sup> Seperti kasus yang menggunakan penganiayaan dimasyarakat.

### **Pembahasan**

#### **A. Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kerja Polisi Sektor (Polsek) Trienggadeng**

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 65.

<sup>3</sup> Korbinmas Baharkam Polri. *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*. Edisi V Tahun 2018. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2018.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.264

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.94

Salah satu peran penting Bhabinkamtibmas adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sebagaimana dilakukan Bhabinkamtibmas di wilayah kerja Polsek Trienggadeng dengan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang hukum kepada masyarakat Trienggadeng, terutama terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku wilayah kerja Polsek Trienggadeng. Dalam hal ini, Bhabinkamtibmas wilayah kerja Polsek Trienggadeng juga melakukan berbagai macam kegiatan, seperti penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat, mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk membahas masalah keamanan dan ketertiban, dan juga memberikan contoh-contoh nyata tentang tindakan yang melanggar hukum dan konsekuensi yang mungkin terjadi.

Selain itu, Bhabinkamtibmas wilayah kerja Polsek Trienggadeng juga ikut membantu masyarakat dalam memahami dan mengakses berbagai layanan hukum, seperti kantor hukum dan pengadilan. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum dan menyelesaikan masalah hukum dengan cara yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Bhabinkamtibmas dapat membantu memperkuat keamanan dan ketertiban wilayah kerja Polsek Trienggadeng. Hal ini juga dapat membantu masyarakat dalam melindungi diri mereka sendiri dan lingkungan mereka dari tindakan kriminal dan pelanggaran hukum lainnya.

#### B. Hambatan Bhabinkamtibmas dan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kerja Polsek Trienggadeng

Meskipun Bhabinkamtibmas dan perangkat desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah kerja Polsek Trienggadeng, namun masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas tersebut. Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi antara lain:

1. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum  
Salah satu hambatan yang sering dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dan perangkat desa di wilayah kerja Polsek Trienggadeng adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Hal ini membuat sulit untuk membuat masyarakat mengerti dan memahami pentingnya hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah  
Bhabinkamtibmas dan perangkat desa membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dapat menjadi hambatan bagi upaya tersebut.
3. Keterbatasan waktu dan sumber daya  
Bhabinkamtibmas dan perangkat desa di wilayah kerja Polsek Trienggadeng memiliki tugas dan tanggung jawab yang banyak dan beragam, sehingga dapat menyebabkan keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melaksanakan program-program sosialisasi hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
4. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian  
Masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian dapat menjadi hambatan dalam melakukan sosialisasi hukum. Masyarakat yang tidak percaya akan sulit untuk menerima dan memahami pesan yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas dan perangkat desa di wilayah kerja Polsek Trienggadeng.
5. Faktor budaya dan lingkungan  
Terdapat beberapa faktor budaya dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di wilayah kerja Polsek Trienggadeng. Beberapa budaya atau norma

yang masih melekat di masyarakat dapat menghambat upaya sosialisasi hukum dan meningkatkan kesadaran hukum.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu adanya sinergi dan kerjasama yang baik antara Bhabinkamtibmas, perangkat desa di wilayah kerja Polsek Trienggadeng, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga hukum. Diperlukan pula upaya untuk memperkuat pemahaman hukum dan membangun kepercayaan masyarakat di wilayah kerja Polsek Trienggadeng terhadap aparat kepolisian melalui kegiatan-kegiatan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, perlu juga dilakukan adaptasi program sosialisasi hukum dengan mempertimbangkan faktor budaya dan lingkungan yang ada di masyarakat Kecamatan Trienggadeng.

### C. Upaya Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kerja Polisi Sektor (Polsek) Trienggadeng

Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak dari kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah desa. Selain menjaga keamanan, Bhabinkamtibmas di wilayah kerja Polsek Trienggadeng juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Berikut adalah beberapa upaya Bhabinkamtibmas di wilayah kerja Polsek Trienggadeng dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, antara lain:

1. Memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat  
Sosialisasi hukum terhadap masyarakat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dengan warga desa, pengajian, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam sosialisasi tersebut, Bhabinkamtibmas di wilayah kerja Polsek Trienggadeng memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sanksi bagi pelanggar hukum, dan hak serta kewajiban masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
2. Mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat  
Bhabinkamtibmas mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat di wilayah kerja Polsek Trienggadeng untuk membahas masalah-masalah hukum yang sering terjadi di wilayah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Bhabinkamtibmas memberikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum dan mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di wilayah kerja Polsek Trienggadeng.
3. Memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum  
Bhabinkamtibmas memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di wilayah kerja Polsek Trienggadeng. Misalnya, Bhabinkamtibmas memantau kegiatan pengadilan atau memastikan bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan. Dengan memberikan pengawasan tersebut, masyarakat akan merasa bahwa penegakan hukum dilakukan secara objektif dan tidak berpihak.
4. Menjalin hubungan yang baik dengan lembaga penegak hukum lainnya  
Bhabinkamtibmas di wilayah kerja Polsek Trienggadeng menjalin hubungan yang baik dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, pengadilan, dan instansi lainnya. Dengan menjalin hubungan yang baik, Bhabinkamtibmas bisa mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan peraturan baru dalam penegakan hukum. Selain itu, dengan menjalin hubungan yang baik, Bhabinkamtibmas bisa meminta bantuan lembaga penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di wilayah kerja Polsek Trienggadeng.

Upaya Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah kerja Polsek Trienggadeng sangat penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat yang kuat. Dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum dan dapat membangun kehidupan yang lebih baik dan damai di wilayah kerja Polsek Trienggadeng.

### **Kesimpulan**

1. Peranan yang dilakukan Bhabinkamtibmas di wilayah kerja Polsek Trienggadeng dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan upaya memberikan edukasi dan sosialisasi tentang hukum kepada masyarakat Trienggadeng, terutama terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku wilayah kerja Polsek Trienggadeng. Bhabinkamtibmas wilayah kerja Polsek Trienggadeng juga melakukan berbagai macam kegiatan, seperti penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat, mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk membahas masalah keamanan dan ketertiban, dan juga memberikan contoh-contoh nyata tentang tindakan yang melanggar hukum dan konsekuensi yang mungkin terjadi.
2. Hambatan Bhabinkamtibmas dan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kerja Polsek Trienggadeng antara lain sebagai berikut:
  - 1) Minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum;
  - 2) Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah;
  - 3) Keterbatasan waktu dan sumber daya;
  - 4) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian;
  - 5) Faktor budaya dan lingkungan.
3. Upaya Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kerja Polisi Sektor (Polsek) Trienggadeng antara lain sebagai berikut:
  - 1) Memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat;
  - 2) Mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat;
  - 3) Memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum;
  - 4) Menjalin hubungan yang baik dengan lembaga penegak hukum lainnya.

### **Referensi**

#### **Buku**

- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Korbinmas Baharkam Polri. 2018. *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2007. *Metode Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2005. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

#### **Dokumen Lain**

- Atang Hermawan. 2014. Kesadaran hukum Masyarakat dan pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol 30. No 1.

- Evi Rinawati, Maryani.2018. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. JOM FISIP.Vol 5. No 2.
- Ida Bagus. 2012. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. Lex Crime. Vol 1. No 4.
- Inyoman nurjaya S.H. 1982. Antara polisi, masyarakat dan pembinaan kamtibmas. Jurnal hukum dan pembangunan. Vol 248. No 1.
- M.Gaussyah. 2010. Peran dan fungsi Polda NAD Di Bidang Kambtibmas Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh. KANUN. Volm1. No 51.

**Dokumen Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2015 Tentang Polmas.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.